

IMPLEMENTASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BERBASIS DIGITAL PADA KANTOR BAPPEDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Fairus Wafiq Anjelica¹, Khairunsyah Purba¹, Nurmaini Dalimunthe¹

¹Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Email: khairunsyah.purba@uin-suska.ac.id (korespondensi)

Abstract

This study aims to determine the application of Electronic Government "SI DILAN" in the management of financial accountability reports at the BAPPEDA Office of Indragiri Hulu Regency, Riau. The method used in this study is descriptive qualitative, with data collection techniques through interviews with selected key informants, namely the Head of BAPPEDA as the person in charge, the main admin as the originator of the application, and the admin of each field at BAPPEDA Indragiri Hulu district. The results of this study explain that the "SI DILAN" application is considered to be helpful in managing the Financial Accountability Report at BAPPEDA Indragiri Hulu Regency. However, in its implementation, there are still obstacles and obstacles such as weak employee responsibility and not optimal infrastructure to support the implementation of digital-based accountability reports.

Keywords: E-Government, SI-DILAN, Finance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Electronic Government "SI DILAN" dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan tehnik pengambilan data melalui wawancara terhadap key informan terpilih yaitu Kepala BAPPEDA sebagai penanggung jawab, admin utama sebagai pencetus aplikasi, dan admin setiap bidang pada BAPPEDA kabupaten Indragiri Hulu. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi "SI DILAN" dinilai membantu dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala dan hambatan seperti lemah responsibilitas pegawai dan belum maksimalnya infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan laporan pertanggungjawaban berbasis digital .

Kata Kunci : E-Government, SI-DILAN, Keuangan

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu ciri dari masyarakat global yang tidak dihindarkan saat ini. Berbagai sektor kehidupan telah terwarnai dengan memanfaatkan teknologi informasi diantaranya pendidikan, finansial, perdagangan, jasa, dan perkantoran. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, waktu tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan efisiensi organisasi baik organisasi privat maupun organisasi publik. Oleh sebab itu digitalisasi pengelolaan organisasi merupakan trend baru yang terus berkembang.

Organisasi sektor public diberbagai lini

juga melakukan digitalisasi birokrasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis. Tindakan digitalisasi birokrasi menuntut aparatur pemerintah untuk mampu bekerja sesuai dengan perkembangan teknologi informasi (Sofianto, 2019:99). Digitalisasi birokrasi merupakan rangkaian upaya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi diperlukan untuk menata ulang sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga meningkatkan kualitas kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) dan menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Namun demikian masih kendala-kendala yang terjadi dalam mewujudkan digitalisasi birokrasi diantaranya kualitas dari aparatur negara dan ketersediaan anggaran (Twizeyimana dan

Andersson, 2019:167). Oleh sebab itu, Investasi pemerintah untuk digitalisasi birokrasi terus meningkat, tetapi penggunaan pelayanan oleh masyarakat masih terbatas (Pérez-Morote et al, 2020:1). Untuk itu diperlukan kesadaran bersama untuk terus meningkatkan, mengembangkan dan memanfaatkan digitalisasi birokrasi untuk menghadirkan tata kelola yang efektif dan efisien.

Menurut Indrajit (2016:21), E-Government adalah pemanfaatan teknologi berbasis informasi yang dikelola pemerintah bertujuan untuk terjadinya transformasi hubungan dengan masyarakat, stake holder, maupun dunia bisnis. Sedangkan menurut Widodo (2016:521), penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja, serta transparansi dan akuntabilitas informasi kepada masyarakat guna terciptanya good governance. Adanya E-Government merupakan sebuah bentuk reformasi birokrasi yang tidak hanya menekankan pada perubahan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan sistem pemerintahan dalam pelibatan masyarakat untuk pengambilan keputusan (Rozikin et al, 2020:62).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu, Riau sebagai perangkat daerah yang mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional telah berupaya mengembangkan electronic government (E-gov) untuk mengefektifkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang kemudian disingkat dengan SI DILAN telah digunakan sejak tahun 2021. Penggunaan SI DILAN didasarkan pada belum efektifnya BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu dalam pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Sebelum menggunakan aplikasi SI-DILAN, Pengelolaan laporan Pertanggungjawaban belum diarsipkan secara sistematis (secara manual). Sistem pengarsipan manual tersebut menyebabkan kesulitan dan membutuhkan waktu lama bagi pegawai untuk menemukan file yang dibutuhkan sehingga tidak efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut BAPPEDA Indragiri Hulu berinisiatif untuk melakukan pengembangan tata kelola laporan pertanggungjawaban berbasis digital yaitu SI DILAN. Dengan pemanfaatan teknologi informasi diharapkan penyelenggaraan penatausahaan Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu dapat lebih optimal (Rozadin, 2021:17-20).

Namun demikian, Dalam pelaksanaan aplikasi SI DILAN masih ditemukan berbagai kendala diantaranya; server penyimpanan yang tersedia bersifat online dan terbatas. Sehingga, data-data laporan pertanggungjawaban harus disalin (back up) secara manual ke komputer admin utama. Tantangan lainnya yaitu penyimpanan berbasis online cenderung rawan keamanan data (*security*), sehingga penggunaan berbagai media berbasis IT dalam tata kelola pemerintahan harus benar-benar diyakini keamanannya. Pada tataran pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan masih sering ditemukan keterlambatan dalam input data Laporan dari tanggal yang sudah ditetapkan yaitu akhir bulan.

Merujuk hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Juliarso (2019:19) tentang implementasi E-Government di Kabupaten Ciamis mengungkapkan bahwa penerapan digitalisasi pemerintahan dapat menunjang pelaksanaan tugas kantor dan pelayanan masyarakat namun keterbatasan kompetensi dan *skill* sumber daya manusia menjadi factor penghambat dalam pelaksanaannya. Sementara itu penelitian Ramadhan (2020:26) tentang inovasi E-Government Si-Cakep di Kabupaten Wajo menjelaskan bahwa penerapan digitalisasi memberi dampak peningkatan keahlian pegawai, pemahaman administrative yang mendalam, dan kebijakan baru yang efektif serta dapat mengukur kegiatan pelayanan publik dan kinerja kepegawaian sehingga meningkatkan kepuasan warga. Hasil penelitian dari Rahmah dan Ranu (2015:16-17) tentang penerapan E-Office di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya menunjukkan diperlukan sosialisasi yang merata untuk setiap pegawai dalam penerapan E-Office sehingga kendala sumber daya manusia dapat teratasi. Sementara itu artikel ini menggambarkan tentang E-Government "SI DILAN" pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu yang terfokus pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. E-Government

E-Government adalah pemanfaatan teknologi berbasis informasi yang dikelola pemerintah bertujuan untuk terjadinya transformasi hubungan dengan masyarakat, *stake holder*, maupun dunia bisnis. Penerapan teknologi tersebut memiliki manfaat antara lain mengoptimalkan

pelayanan pemerintah dalam hal kinerja kepada para elemen pendukung, meningkatkan akuntabilitas, menekan anggaran administrasi pada relasi dalam interaksi, membuat masyarakat *up to date* terhadap lingkungan, memungkinkan peluang untuk melahirkan sumber-sumber penghasilan yang baru, serta memberdayakan masyarakat (Indrajit, 2016). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berguna untuk meningkatkan kinerja, serta transparansi dan akuntabilitas informasi kepada masyarakat guna terciptanya *good governance* (Widodo, 2016). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan hubungan yang baik antara pemerintah dengan pihak lain bisa diciptakan melalui pemanfaatan teknologi informasi (Setiawan, 2016).

Secara regulasi, implementasi e-government termuat dalam berbagai aturan antara lain; UUD 1945 pasal 28F, Inpres no 3 tahun 2003, UU no 25 tahun 2009, dan UU no 14 tahun 2008. Implementasi E-Government dilaksanakan setelah diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003. Peraturan tersebut memuat Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Inpres ini dibuat sebagai dasar untuk menyamakan pandangan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahannya sehingga terwujud pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien serta adanya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Sistem ini menjadi alat penghubung antara *government* dengan *government* (G2G), *government* dengan staf (*employee*) (G2E), dan *government* dengan masyarakat (G2C) (Maulana *et al.*, 2019).

Menurut Aritonang (2017), implementasi E-Government merupakan bentuk sistem kerja pemerintahan secara dinamis yang mengalami perubahan dan adanya suatu tuntutan yang memerlukan perubahan. Implementasi *E-Government* tidak hanya mengalami perubahan sistem kerja manual, tetapi adanya suatu perubahan yang berbasis komputerisasi. Pentingnya pengembangan sistem informasi dalam implementasi E-Government memerlukan keselarasan dengan data birokrasi yang ada sehingga teknologi komunikasi informasi terbut dapat bekerja secara optimal (Farida, 2021). Di Indonesia, *E-Government* menjadi sebuah kegiatan atau penyelenggaraan guna mendorong dan memfasilitasi hubungan yang saling bersinergi antara masyarakat,

pemerintah maupun dunia bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Valle-Cruz, 2019). Pemanfaatan aplikasi-aplikasi yang mendukung pengembangan teknologi informasi di daerah masih memiliki kendala, yaitu kurangnya sumber daya pelaksana (SDM), masih adanya gangguan dalam jaringan dan konektivitas (infrastruktur) dan masih adanya petunjuk teknis yang belum diperkuat oleh peraturan yang ada (Kurniansyah dan Hannie, 2020).

Retnowati (2008) mengatakan ada beberapa faktor-faktor dalam hal menentukan keberhasilan penerapan *E-Government*. Hal tersebut antara lain kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama, penyediaan infrastruktur, jaringan dan konektivitas oleh pemerintah, Sumber Daya Manusia (SDM), serta penganggaran, ketersediaan *legal standing* dan juga edukasi perubahan paradigma masyarakat. Sedangkan menurut Wirawan (2020), ada tiga hal hambatan ataupun kendala dalam penerapan E-Government yang mendasar pada lingkup pemerintahan daerah yaitu inisiatif yang kurang dari pemerintahan daerah itu sendiri, sistem manajemen pemerintah daerah yang belum didukung oleh situs web daerah yang memadai, dan perspektif mayoritas pemerintah daerah bawah implementasi E-Government hanya cukup memiliki situs web (*web presence*) saja.

Penerapan E-Government di Indonesia sampai saat ini terus ditingkatkan baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Menurut Indrajit (2016), E-Government memiliki manfaat antara lain mengoptimalkan pelayanan pemerintah meningkatkan akuntabilitas, menekan anggaran administrasi, mempermudah akses informasi bagi masyarakat terkait berbagai program pemerintah. Dari pemaparan tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa E-Government merupakan aktifitas pemerintah dalam memberikan inovasi baru dengan menggunakan dan memanfaatkan media teknologi informasi bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien.

2.2. SI DILAN (Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan)

Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI DILAN) merupakan salah satu penerapan E-

Government berbasis aplikasi dalam mengelola arsip Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Aplikasi SI DILAN diinisiasi oleh seorang pegawai BAPPEDA Indragiri Hulu. Aplikasi kemudian diluncurkan pertama kali secara resmi oleh Plt. Kepala BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu, H. Syahrudin, S.Sos, MT bertempat Ruang Rapat BAPPEDA. Peluncuran tersebut juga menandakan pelaksana kegiatan melakukan entri data LPJ wajib melalui aplikasi SI DILAN.

Berdasarkan *Manual Book* Aplikasi SI DILAN (2021), aplikasi ini merupakan media yang menyediakan penyimpanan dan pengarsipan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan yang berbasis smartphone ataupun komputer dengan keamanan yang ketat. Keamanan aplikasi ini berguna dalam menyimpan dokumen bukti dari penggunaan anggaran pada perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Tujuan yang diharapkan dalam implementasi SI DILAN, yaitu mengawasi (monitoring) pegawai dalam hal tata kelola Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan, memudahkan pengarsipan data-data keuangan, dan pencarian data arsip terhadap data arsip terbaru menjadi mudah karena diatur oleh sistem yang dinamis. Latar belakang pengadaan aplikasi SI DILAN pada pelaksanaan kegiatan BAPPEDA Indragiri Hulu, mencakup tiga hal antara lain bentuk aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), belum adanya media arsip LPJ digital, dan mempermudah dalam pelaksanaan Verifikasi LPJ. Bidang-bidang yang terlibat dalam penerapan SI DILAN antara lain Ekonomi, FISPR (Fisik dan Prasarana), PEMKESRA (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Perencanaan Daerah dan Peneliti Pengembangan, dan Sekretariat. Penerapan SI Dilan merupakan bukti bahwa pemerintahan daerah Indragiri Hulu dapat dapat beradaptasi dengan dengan tata kelola pemerintahan berbasis digital.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif research dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan berbasis digital. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Teknik pengambilan data melalui wawancara pada key informan dan observasi terhadap berbagai dokumen yang relevan

dan proses kerja di BAPPEDA kabupaten Indragiri Hulu. Proses wawancara dilakukan terhadap key informan terpilih yang dianggap mengetahui, memahami dan terlibat dalam implementasi Aplikasi Si-DILAN. Key informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala BAPPEDA sebagai penanggung jawab, admin utama sebagai pencetus dan pembuat aplikasi SI-DILAN, dan admin di setiap bidang pada Kantor BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hulu. Selain wawancara, penulis juga melakukan observasi untuk pengumpulan data secara sistematis dan selektif terkait informasi yang didapatkan (Sugiyono, 2009:145). Selanjutnya, data-data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Infrastruktur Telekomunikasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan factor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan electronic government. Secara ideal, keberadaan infrastruktur akan menunjang kinerja dan minimnya infrastruktur akan menimbulkan kendala dan hambatan dalam melaksanakan electronic government. Indrajit dkk (2005:9), mengungkapkan bahwa perangkat keras dalam pelaksanaan electronic government dapat diidentifikasi dengan computer dan jaringan. Sementara itu, Kadir (2017:144) mengungkapkan perangkat keras merupakan peranti-peranti yang berupa fisik termasuk seperti komputer, printer, mouse, dan sebagainya. Perangkat keras tidak dapat dipisahkan dengan sistem pada suatu perangkat lunak, hal ini dikarenakan keduanya merupakan kesatuan sistem operasi pengolahan data-data ataupun informasi. Perangkat lunak merupakan program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan (user manual) (Sukanto dan Shalahuddin, 2018:2). Sedangkan infrastruktur perangkat lunak diantaranya adalah tersedianya jaringan (WiFi) dan aplikasi-aplikasi pendukung di komputer.

Infrastruktur teknologi dalam menunjang penerapan aplikasi SI-DILAN didukung dengan adanya perangkat keras dan perangkat lunak. Indikator infrastruktur telekomunikasi tentunya sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan SI DILAN. Adapun rincian pengadaan perangkat keras untuk mendukung penggunaan aplikasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Perangkat Keras Pendukung SI DILAN

Nama barang	Total	Baik		Rusak	
		Unit	%	Unit	%
Hard Disk External	2	1	50%	1	50%
Komputer Notebook	3	2	67%	1	33%
Komputer PC (Server)	10	4	40%	6	60%
Printer	4	3	75%	1	25%
Printer Multifungsi	6	2	34%	4	66%
WiFi :	5	4	90%	1	10%
a. 50 mbps,					
b. 30 mbps,					
c. 20 mbps (3 unit)					

(Sumber: Kesekretariatan BAPPEDA, 2023)

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa ketersediaan infrastruktur perangkat keras dalam mendukung aplikasi SI DILAN belum sepenuhnya dalam performa yang baik. Dari enam perangkat keras yang tersedia terdapat dua perangkat keras yang paling tinggi tingkat kerusakannya, yaitu komputer PC (Server) dan Printer Multifungsi. Kondisi performa perangkat keras yang tidak optimal memberikan efek bagi berjalannya aplikasi SI DILAN

Penerapan SI-DILAN juga didukung perangkat lunak seperti Microsoft Office (Word, Excel, dan Power Point) dan Epson Scanner. Penyediaan perangkat-perangkat tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan implementasi Laporan Pertanggungjawaban berbasis digital pada kantor BAPPEDA Indragiri Hulu. Sementara itu, ketersediaan infrastruktur jaringan internet di BAPPEDA Indragiri Hulu telah tersedia dengan baik. Pegawai dan admin SI DILAN mengungkapkan bahwa jaringan internet senantiasa tersedia dengan lancar dan jarang terjadi kendala. Pada situasi tertentu bila terjadi gangguan jaringan, umumnya pegawai menggunakan kuota pribadi dalam mengoperasikan SI DILAN. Namun situasi tersebut tidak sering terjadi. Admin sekretariat menerangkan bahwa jika ada permasalahan jaringan maka admin SI DILAN segera menghubungi penyedia layanan agar segera melakukan perbaikan.

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa ketersediaan infrastruktur aplikasi SI DILAN belum maksimal. Infrastruktur yang tersedia diantaranya; *Hard disk eksternal*, Komputer *notebook*, komputer PC (server), Printer, Printer multi fungsi dan wifi. Untuk memaksimalkan implementasi SI DILAN diperlukan pemeliharaan infrastruktur secara berkala baik perangkat keras maupun perangkat lunak sehingga kondisi infrastruktur SI DILAN tetap dalam kondidi baik. Pemeliharaan infrastruktur juga berfungsi untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah.

4.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan factor pendukung dan penentu kesuksesan implementasi dalam segala bidang, diantaranya implementasi *electronic government*. Pemahaman dan kecakapan *user* (pengguna) teknologi ataupun pelaksana sangat diperlukan untuk merwujudkan pelaksanaan *electronic government* yang optimal. Sebagaimana yang di ungkapkan Ansory dan Indrasari (2018:59) bahwa individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Berdasarkan hasil penelitian, tenaga admin SI DILAN terdiri dari admin utama, admin pendukung di setiap bidang BAPPEDA kabupaten Indragiri Hulu. BAPPEDA Indragiri Hulu memiliki lima bidang diantaranya: Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Prasana, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan dan Kesekretariatan. Pada masing-masing bidang terdapat 2 orang admin yang terdiri dari bendahara bidang dan admin pembantu. Admin pembantu pada masing-masing bidang berfungsi membantu operasional aplikasi SI DILAN. Hal ini dikarenakan admin pembantu lebih kompeten dalam mengoperasikan aplikasi SI DILAN.

Pelatihan Penggunaan aplikasi SI DILAN telah dilakukan terhadap seluruh pegawai BAPPEDA Indragiri Hulu sebelum penerapan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan berbasis digital dilaksanakan. Hal Ini dilakukan agar memperlancar *user* dalam menggunakan Aplikasi SI DILAN. Sosialisasi dan pelatihan tersebut meliputi pemaparan latar belakang, alur operasi, serta ketentuan dan mekanisme penggunaan yang dilaksanakan pada Desember tahun 2021.

Secara teknis, seluruh admin mengungkapkan bahwa aplikasi SI DILAN mudah dilaksanakan dan membantu dalam pekerjaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di BAPPEDA Indragiri Hulu. Bendahara bidang menyerahkan tanggung jawab *upload* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan kepada Admin pembantu di setiap bidang. Admin pembantu tersebut terdiri dari pegawai tetap dan THL (Tenaga Lepas Harian), dengan kisaran usia rentang 23-27 tahun. Sedangkan tingkat pendidikan Admin dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Pengguna SI DILAN

Pegawai	Tingkat Pendidikan	
	Diploma	Sarjana
Admin Utama	-	2
Ekonomi	-	2
Fisik dan Prasarana Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1	1
Perencanaan Daerah dan Peneliti	-	2
Pengembangan Sekretariat	1	1
	1	3

(Sumber : Kesekretaritan BAPPEDA, 2023)

Berdasarkan table tersebut, diketahui masih ada Admin yang berpendidikan SMA. Penggunaan admin pembantu disetiap bidang dikarenakan dari aspek kompetensi teknis penggunaan aplikasi mereka lebih baik, Sehingga tanggung jawab opsional upload berkas di setiap bidang diserahkan ke admin pembantu. Namun, dari aspek tanggung jawab kerja admin pembantu belum responsive secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari penundaan *up load* berkas sehingga sering terjadi keterlambatan penerimaan Laporan Pertanggung Jawaban ke admin utama. Pengganggu jawab admin di setiap bidang perlu menjalankan mekanisme control terhadap admin pembantu disetiap bidang dan diperlukan program peningkatan *soft skill* bagi pegawai untuk semakin meningkatkan daya responsive terhadap pekerjaan.

Beberapa keluhan dari admin pembantu diantaranya; ketentuan ukuran dokumen scan yang bisa diunggah, yaitu kurang atau sama dengan 2 mb (megabyte) dan belum adanya tracking sistem guna pemantauan progress kinerja. Tentunya hal ini, harus menjadi evaluasi dan masukan kedepannya bagi pengoptimalan SI DILAN.

4.3 Ketersediaan Dana dan Anggaran

Anggaran merupakan factor penentu bagi keberhasilan implementasi *electronic government*. Ketersediaan anggaran akan meningkatkan kinerja berbasis digitalisasi. Selain itu, penganggaran dimaksudkan untuk memastikan alokasi perawatan dan pengembangan *electronic government* di masa yang datang. Penerapan anggaran untuk aplikasi SI DILAN digunakan untuk *maintanance* dan

penyewaan *server* aplikasi sebesar 1.500.000/tahun, Rp 100.000/bulan untuk pengecekan *coding* berkala dan Rp 300.000/tahun untuk sewa *server* sendiri. Hingga saat ini, anggaran opsional aplikasi SI DILAN tersedia cukup, hanya BAPPEDA belum menyediakan anggaran pengembangan aplikasi.

4.4 Perangkat Hukum

Konsep *E-Government* berkaitan dengan usaha pendistribusian data maupun penciptaan dari satu pihak ke pihak lain sehingga keamanan data maupun hak cipta perlu dilindungi oleh undang-undang ataupun aturan yang berlaku Indrajit dkk (2005:9). Keberadaan perangkat hukum bertujuan untuk jaminan terciptanya pengelolaan pemerintah melalui digitalisasi yang kondusif. Legal standing atau payung hukum dalam penerapan SI DILAN berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BAPPEDA Nomor 050/Bappeda-SK/64 tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Aplikasi Digital Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SI DILAN) dan Standar Operasional Prosedur SI DILAN Nomor 1.8.2.3.5 tanggal 27 Oktober 2021 Tanggal Efektif 1 November 2021.

Selain itu, dalam penerapan digitalisasi pemerintahan diperlukan ketegasan ketika ada pelanggaran-pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan belum ada aturan tertulis mengenai sanksi-sanksi seperti keterlambatan dan sebagainya dalam pengoperasian SI DILAN. Sanksi hanya berupa teguran lisan, dan perintah untuk segera melengkapi dan menyelesaikan dalam waktu waktu tertentu.

4.5. Penyesuaian Paradigma

Pelaporan dan pengarsipan yang semulanya dilakukan secara manual, kini dialihkan ke digitalisasi memerlukan adanya kesamaan pemahaman. Penyamaan tersebut bertujuan agar setiap pihak yang terlibat menyadari bahwa hal tersebut bertujuan untuk keefektifan dan keefisienan dalam bekerja dan melayani. Penyesuaian paradigma merupakan sudut pandang pengguna terhadap adanya penerapan SI DILAN. Penyesuaian paradigma diperlukan sebagai bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dari penerapan SI DILAN tersebut. Para pegawai menyadari pentingnya aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi iSI DILAN sangat membantu dan memudahkan kerjanya serta berharap akan ada terus pengembangan kedepannya. Dominan key informan mengungkapkan bahwa Aplikasi SI

DILAN mudah dipahami setelah diadakannya pelatihan. Pegawai juga berharap agar aplikasi SI DILAN dapat dikembangkan agar lebih mudah dan demi kenyamanan pengguna seperti fitur-fitur pendukung di aplikasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan SI DILAN pada Kantor BAPPEDA Indragiri Hulu dinilai efektif dalam membantu pengelolaan keuangan dan pengarsipan laporan pertanggungjawaban keuangan. Bidang-bidang yang menerapkan aplikasi tersebut antara lain Ekonomi, Fisik & Prasarana, Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat, Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan, dan Sekretariat. Kendala dan hambatan penerapan SI DILAN sejauh ini dapat diatasi baik masalah keamanan dan kapasitas penyimpanan arsip dengan penganggaran dana per tahun yang cukup memadai. Namun dari aspek Inprastruktur dan Sumber Daya Manusia perlu mendapat perhatian dengan meningkatkan anggaran untuk penyediaan perangkat keras yang rusak, pengembangan aplikasi SI DILAN dan peningkatan *soft skill* sehingga pegawai lebih *responsive* dalam bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Almas, A. F. (2018). Sumbangan Paradigma Thomas S. Kuhn dalam Ilmu Dan Pendidikan (Penerapan Metode Problem Based Learning dan Discovery Learning). At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam, 3(1), 89-106.
- [2] Ansory, A. F dan Indrasari. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- [3] Hendrayadi, A. (2020). "Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Era Revolusi Industri 4.0", Dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Volume 04 Nomor 02* Februari 2020.
- [4] Hoetoro, A., & Satria, D. (2020). *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- [5] Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2005). *Electronic Government in Action (Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia)*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- [6] Indrajit, R., E. (2016). *Electronic Government "Strategi Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital"*. Yogyakarta: Andi.
- [7] Juliarso, A. (2019). Analisis Implementasi E-Government Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(1), 10-15
- [8] Kadir, A. (2017). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- [9] Nurkholis, A., Riyantomo, A., & Tafrikan, M. (2017). Sistem Pakar Penyakit Lambung Menggunakan Metode Forward Chaining. *Momentum*, 13(1), 32-38.
- [10] Pérez-Morote, R., Pontones-Rosa, C., & Núñez-Chicharro, M. (2020). The effects of e-government evaluation, trust and the digital divide in the levels of e-government use in European countries. *Technological forecasting and social change*, 154, 119973.
- [11] Rahmah, S. U., & Ranu, M. E. (2015). Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Menerapkan E-Office Untuk Mendukung E-Government Dalam Kegiatan Korespondensi Kedinasan Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*, 20.
- [12] Ramadhan, A. D. (2020) Pengaruh Inovasi Kepegawaian Berbasis Aplikasi Mobile Si-Cakep Terhadap Efektivitas Pelayanan. *Skripsi*. Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [13] Rozadin, R. (2021). *Rancangan Aksi Perubahan SI DILAN*. Rengat Barat : BAPPEDA INHU.
- [14] Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61-80.
- [15] Sofianto, A. (2019). Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi Digital di Provinsi Jawa Tengah. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(2), 99-108.
- [16] Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [17] Sukamto & Shalahuddin. (2018). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Bandung: Informatika.
- [18] Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government– A literature review. *Government information quarterly*, 36(2), 167-178.
- [19] Widodo, B. E. C., Darumurti, A., & Nurmandi, A. (2016). Strategi Pelembagaan Good Governance Dalam Proses Pemilu Di Indonesia. *Kata Sambutan Ketua Pelaksana*, 521.